GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 04 No. 01 juni 2026
ISSN: 3063-1963 | e-ISSN: 3063-203x

GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam

http://journal.ptiq.ac.id/index.php/gapai/

Kesejahteraan Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Mutu Pembelajaran

Rohaniatul Fazilah[1], Alfaatihatul Madaniyyah[2]

[1]Universitas Mathla'ul Anwar, [2] Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

[1]e-Mail: Rohaniatulfazilah18@gamil.com, [2] alfaatihatul@mhs.ptiq.ac.id

Abstrak. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritualitas peserta didik, namun kualitas pelaksanaan tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang mereka terima. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kesejahteraan guru PAI, yang meliputi aspek finansial, non-finansial, dan psikologis, berperan sebagai faktor pendukung dalam peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah maupun madrasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu menelaah dan menganalisis berbagai sumber ilmiah berupa artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi kebijakan pendidikan yang relevan dengan topik kesejahteraan guru dan mutu pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesejahteraan guru PAI, khususnya guru berstatus honorer, masih berada pada tingkat yang belum memadai dibandingkan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya motivasi mengajar, terbatasnya pengembangan profesional, dan menurunnya kualitas interaksi pedagogis antara guru dan peserta didik. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan yang mencakup gaji layak, tunjangan profesi, jaminan sosial, penghargaan, serta dukungan lingkungan kerja yang kondusif terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, kreativitas, dan komitmen guru dalam mengelola proses pembelajaran. Artikel ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan guru PAI yang berkeadilan sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam secara nasional.
Kata Kunci: Guru Pendidikan Agama Islam; Kesejahteraan Guru; Motivasi Mengajar; Mutu Pembelajaran; Profesionalisme Guru

1. Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran strategis dalam sistem pendidikan nasional yang berfungsi tidak hanya untuk menstransfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk akidah, akhlak, dan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, serta berkarakter mulia. Melalui pembelajaran PAI, nilai-nilai keislaman ditanamkan secara sistematis sejak usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi sebagai bekal moral dalam menghadapi tantangan zaman. Keberhasilan pencapaian tujuan mulia tersebut sangat bergantung pada kualitas guru PAI sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum di ruang kelas.

Guru PAI memiliki peran ganda yang tidak dimiliki oleh guru mata pelajaran lain, yaitu sebagai pengajar sekaligus teladan (uswah hasanah) dalam kehidupan sehari-hari.

Ainiyah (2013) menegaskan bahwa pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam hanya dapat berjalan efektif apabila guru mampu menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam sikap dan perilaku nyata, bukan sekadar transfer pengetahuan kognitif semata. Oleh karena itu, kualitas pribadi, kompetensi profesional, dan komitmen guru PAI menjadi variabel penentu keberhasilan pendidikan karakter di sekolah maupun madrasah.

Namun demikian, di balik peran strategis tersebut, realitas menunjukkan bahwa kesejahteraan guru PAI, khususnya yang berstatus honorer, masih jauh dari kondisi ideal. Rusli (2025) mengungkapkan bahwa kesejahteraan guru honorer dalam perspektif Islam semestinya mendapat perhatian khusus mengingat prinsip keadilan dan penghargaan terhadap jasa seseorang yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, sementara pada praktiknya banyak guru honorer PAI menerima honorarium yang jauh di bawah standar kelayakan hidup. Kondisi serupa juga dipaparkan oleh Safitri (2023) yang menemukan bahwa rendahnya kesejahteraan guru honorer berkorelasi langsung dengan menurunnya kinerja mengajar di satuan pendidikan dasar.

Ketimpangan kesejahteraan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan beban kerja guru PAI yang terus meningkat seiring perubahan kurikulum. Wahyudin (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat kesejahteraan guru dan beban kerja secara simultan memengaruhi kinerja guru, di mana guru yang memiliki kesejahteraan rendah namun beban kerja tinggi cenderung mengalami penurunan motivasi dan produktivitas mengajar. Fenomena ini diperparah oleh tantangan implementasi Kurikulum Merdeka yang menuntut guru PAI untuk terus beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis proyek, sebagaimana diuraikan oleh Setiawan (2024), tanpa diimbangi dengan dukungan kesejahteraan dan insentif yang memadai.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah minimnya perlindungan hukum dan kepastian status kepegawaian bagi guru PAI honorer, yang menyebabkan mereka rentan terhadap pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu tanpa pesangon maupun jaminan kelangsungan penghasilan. Ketidakpastian semacam ini menambah beban psikologis guru PAI di samping tekanan ekonomi yang telah mereka hadapi, sehingga semakin memperkuat urgensi pembenahan kebijakan kesejahteraan guru secara menyeluruh dan berkeadilan.

Persoalan kesejahteraan guru PAI juga tidak lepas dari konteks kelembagaan yang beragam, mulai dari sekolah umum, madrasah, hingga sekolah inklusi. Ru'iya dkk. (2021) menemukan bahwa guru PAI di sekolah inklusi menghadapi tantangan ganda, yaitu tuntutan kompetensi pedagogik khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus sekaligus keterbatasan dukungan kesejahteraan dan fasilitas kerja. Ketimpangan semacam ini menegaskan bahwa isu kesejahteraan guru PAI bukan sekadar persoalan ekonomi semata, melainkan juga menyangkut keadilan struktural dalam kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana disoroti oleh Salamun dan Sauri (2023) dalam analisis evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam.

Di sisi lain, mutu pembelajaran PAI menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pendidikan agama di sekolah. Mutu pembelajaran yang baik ditandai dengan penguasaan materi yang mendalam, kreativitas metode pengajaran, pemanfaatan media pembelajaran yang variatif, serta kemampuan evaluasi yang komprehensif. Rosni (2021) menegaskan bahwa kompetensi guru menjadi faktor determinan dalam peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, dan kompetensi tersebut tidak dapat berkembang optimal tanpa didukung oleh kondisi kesejahteraan yang layak. Guru yang secara ekonomi dan psikologis merasa aman cenderung lebih fokus, kreatif, dan

berdedikasi tinggi dalam merancang serta melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu.

Fenomena ketimpangan kesejahteraan guru PAI juga perlu dilihat dalam bingkai yang lebih luas, yaitu transformasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Sejak otonomi daerah diberlakukan, pengelolaan tenaga honorer, termasuk guru PAI pada satuan pendidikan negeri maupun swasta, banyak diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah dan yayasan penyelenggara pendidikan. Akibatnya, muncul variasi yang sangat lebar dalam hal besaran honorarium, jaminan sosial, maupun peluang pengembangan karier antar-daerah, sehingga guru PAI di wilayah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan rekan sejawatnya di wilayah dengan kapasitas fiskal yang lebih baik.

Di samping itu, citra sosial guru PAI sebagai figur yang dianggap "berjuang di jalan dakwah" kerap kali menjadi pembenaran informal atas rendahnya perhatian terhadap aspek kesejahteraan material mereka, seolah-olah pengabdian keagamaan mengharuskan guru PAI untuk mengesampingkan hak-hak ekonominya. Pandangan semacam ini, jika dibiarkan tanpa kritik, berpotensi melanggengkan ketimpangan struktural dan mengaburkan tanggung jawab kolektif negara, satuan pendidikan, serta masyarakat dalam memastikan kesejahteraan guru PAI sebagai bagian dari investasi jangka panjang terhadap kualitas generasi bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan yang nyata antara idealisme peran guru PAI sebagai pembentuk karakter bangsa dengan realitas kesejahteraan yang mereka terima. Artikel ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana kesejahteraan guru PAI berperan sebagai faktor pendukung dalam peningkatan mutu pembelajaran, dengan menelusuri dimensi-dimensi kesejahteraan, realitas di lapangan, keterkaitannya dengan motivasi dan kinerja guru, serta strategi kebijakan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan guru PAI yang lebih berkeadilan. Kajian ini penting dilakukan mengingat masih terbatasnya literatur yang secara khusus mengintegrasikan aspek kesejahteraan guru PAI dengan mutu pembelajaran dalam satu kerangka analisis yang utuh.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data dan informasi melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan dengan topik kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam dan mutu pembelajaran. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan sintesis dan analisis kritis terhadap berbagai temuan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer berupa artikel jurnal nasional yang membahas kesejahteraan guru, kinerja guru, dan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam, serta sumber sekunder berupa buku teks kependidikan, regulasi pemerintah terkait guru dan tenaga kependidikan, serta laporan hasil penelitian yang dipublikasikan pada repositori dan basis data akademik. Penelusuran sumber dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti "kesejahteraan guru", "guru Pendidikan Agama Islam", "mutu pembelajaran", dan "kinerja guru" pada mesin pencari akademik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis kualitatif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan literatur yang relevan berdasarkan tema kesejahteraan finansial, non-finansial, dan psikologis guru. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan temuan ke dalam kerangka pembahasan yang sistematis, mulai dari konsep kesejahteraan, realitas di lapangan, hingga keterkaitannya dengan mutu pembelajaran. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan, dilakukan dengan menginterpretasikan pola hubungan antar-tema untuk merumuskan proposisi mengenai peran kesejahteraan guru PAI terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

Keabsahan data dalam penelitian kepustakaan ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai artikel dan hasil penelitian yang berbeda namun membahas tema yang sama, sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih kredibel dan tidak bias pada satu sumber tertentu.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur, yaitu sifatnya yang murni deskriptif-analitis berdasarkan literatur sekunder tanpa didukung oleh data lapangan primer, seperti wawancara langsung dengan guru PAI maupun survei kuantitatif berskala besar. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan bersifat proposisi teoretis yang perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris agar dapat digeneralisasi secara lebih meyakinkan pada konteks yang lebih luas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep dan Dimensi Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan guru secara konseptual dapat dipahami sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis guru sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas profesionalnya, sehingga guru dapat menjalankan fungsi kependidikan secara optimal. Dudung (2018) menjelaskan bahwa kompetensi profesional guru tidak dapat dilepaskan dari faktor kesejahteraan, karena guru yang sejahtera secara ekonomi memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, studi lanjut, maupun penyediaan sumber belajar mandiri. Dengan demikian, kesejahteraan bukan sekadar hak normatif guru, melainkan juga prasyarat bagi terwujudnya profesionalisme dalam menjalankan tugas mengajar.

Secara teoretis, konsep kesejahteraan guru dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi finansial yang mencakup gaji pokok, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan insentif kinerja. Kedua, dimensi non-finansial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan hari tua, kesempatan pengembangan karier, serta fasilitas kerja yang memadai. Ketiga, dimensi psikologis yang mencakup rasa aman dalam bekerja, pengakuan atas dedikasi, penghargaan sosial, serta kepuasan batin dalam menjalankan profesi sebagai pendidik. Ketiga dimensi tersebut saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membentuk kondisi kesejahteraan guru secara utuh.

Kerangka kebutuhan manusia yang dikemukakan Maslow turut relevan digunakan untuk memahami kesejahteraan guru, di mana kebutuhan fisiologis dan rasa aman (finansial dan jaminan sosial) menjadi fondasi dasar sebelum guru dapat mencapai aktualisasi diri berupa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Apabila kebutuhan dasar tersebut belum terpenuhi secara layak, maka sulit diharapkan guru mampu mencurahkan seluruh potensi profesionalnya secara maksimal dalam proses pembelajaran, termasuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang menuntut kedalaman spiritual dan keteladanan personal.

Khusus bagi guru PAI, dimensi kesejahteraan psikologis memiliki bobot yang relatif lebih besar dibandingkan guru mata pelajaran umum, mengingat tugas keagamaan yang diemban menuntut ketenangan batin dan kestabilan spiritual. Guru PAI yang mengalami tekanan ekonomi cenderung mengalami distraksi dalam menjalankan fungsi keteladanan, sehingga pesan-pesan moral dan keagamaan yang disampaikan berpotensi kehilangan kekuatan internalisasinya terhadap peserta didik.

3.2. Realitas Kesejahteraan Guru Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan kesejahteraan antara guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan guru honorer masih menjadi persoalan struktural dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk bagi guru PAI. Safitri (2023) dalam analisisnya terhadap guru honorer di salah satu madrasah ibtidaiyah menemukan bahwa honorarium yang diterima jauh di bawah upah minimum daerah, sementara beban administratif dan tuntutan capaian pembelajaran tidak berbeda dengan guru berstatus ASN. Kesenjangan semacam ini menimbulkan disparitas motivasi kerja yang berdampak pada konsistensi kualitas pengajaran.

Rusli (2025) menyoroti persoalan kesejahteraan guru honorer dari perspektif keislaman, dengan menegaskan bahwa prinsip keadilan (al-'adl) dan pemberian upah yang layak (ujrah al-mitsl) merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang semestinya menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pengupahan guru, termasuk guru PAI yang notabene menjadi teladan dalam mengajarkan nilai keadilan tersebut kepada peserta didik. Ironisnya, banyak guru PAI honorer justru mengalami perlakuan yang jauh dari prinsip keadilan yang mereka ajarkan.

Wahyudin (2020) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan guru secara signifikan memengaruhi kinerja guru, terutama pada aspek kedisiplinan, persiapan perangkat pembelajaran, dan interaksi dengan peserta didik. Guru yang mengalami tekanan ekonomi cenderung mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga waktu dan energi yang seharusnya dicurahkan untuk persiapan pembelajaran menjadi terbagi. Kondisi ini tentu berimplikasi langsung terhadap kualitas proses belajar-mengajar PAI di kelas.

Selain persoalan finansial, guru PAI juga menghadapi tantangan kelembagaan yang beragam. Ru'iya dkk. (2021) menemukan bahwa guru PAI di sekolah inklusi menghadapi beban kerja tambahan dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus tanpa disertai pelatihan dan insentif khusus yang memadai. Sementara itu, Setiawan (2024) mencatat bahwa implementasi Kurikulum Merdeka menuntut guru PAI untuk mengembangkan modul ajar dan asesmen yang lebih kompleks, namun tidak diimbangi dengan penyesuaian beban kerja maupun tunjangan yang proporsional. Kondisi-kondisi tersebut menggambarkan bahwa kesejahteraan guru PAI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan pendidikan.

3.3. Keterkaitan Kesejahteraan dengan Motivasi, Kinerja, dan Profesionalisme Guru

Berbagai penelitian menegaskan adanya keterkaitan yang erat antara kesejahteraan guru dengan motivasi kerja dan kinerja mengajar. Putri dan Imaniyati (2017) menjelaskan bahwa pengembangan profesi guru, yang salah satu prasyaratnya adalah kesejahteraan yang memadai, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja guru secara keseluruhan. Guru yang memperoleh dukungan kesejahteraan yang

layak cenderung memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi serta motivasi intrinsik yang lebih kuat dalam menjalankan tugas kependidikan.

Senada dengan hal tersebut, Putra dan Negara (2021) menemukan bahwa kompetensi profesional guru dan motivasi kerja secara bersama-sama memberikan kontribusi positif terhadap kinerja guru sekolah dasar. Motivasi kerja dalam penelitian ini banyak dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan seperti insentif, penghargaan, dan kepastian karier. Ketika faktor-faktor tersebut terpenuhi, guru menunjukkan inisiatif yang lebih besar dalam mengembangkan metode pembelajaran serta lebih responsif terhadap kebutuhan belajar peserta didik.

Muspawi (2021) menambahkan bahwa strategi peningkatan kinerja guru tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan, serta penciptaan iklim kerja yang kondusif. Guru yang merasa dihargai secara profesional dan finansial cenderung lebih terbuka terhadap inovasi pembelajaran dan lebih siap menghadapi tantangan perubahan kurikulum. Hal ini relevan dengan kondisi guru PAI yang dituntut untuk terus berinovasi dalam metode pengajaran nilai-nilai keagamaan agar tetap relevan dengan konteks kehidupan peserta didik masa kini.

Aspek pengembangan profesi berkelanjutan juga menjadi variabel penting yang menjembatani kesejahteraan dan kinerja guru. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mengikuti pelatihan, seminar, maupun forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI sangat bergantung pada dukungan kesejahteraan dan kebijakan satuan pendidikan. Guru yang memiliki akses memadai terhadap forum pengembangan profesi tersebut cenderung lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan kurikulum dan lebih mampu mengintegrasikan pendekatan pembelajaran kontemporer ke dalam materi keagamaan tanpa mengurangi kedalaman substansi ajaran Islam yang disampaikan.

Keterkaitan antara kesejahteraan dan kinerja guru PAI juga dapat dipahami melalui perspektif kepuasan kerja. Guru yang puas terhadap kondisi kerja dan kesejahteraannya cenderung menunjukkan perilaku kerja ekstra (extra-role behavior), seperti kesediaan membimbing peserta didik di luar jam pelajaran, mengembangkan kegiatan keagamaan ekstrakurikuler, dan menjalin komunikasi intensif dengan orang tua peserta didik. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap kesejahteraan berpotensi memunculkan sikap apatis, penurunan disiplin, dan minimnya inisiatif dalam pengembangan pembelajaran.

3.4. Kesejahteraan Guru PAI sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Mutu *Pembelajaran*

Mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada dasarnya merupakan hasil interaksi kompleks antara kompetensi guru, ketersediaan sumber belajar, dukungan manajemen sekolah, dan kondisi kesejahteraan guru itu sendiri. Rosni (2021) menegaskan bahwa kompetensi guru menjadi variabel kunci dalam peningkatan mutu pembelajaran, namun kompetensi tersebut hanya dapat berkembang optimal apabila didukung oleh kondisi kerja dan kesejahteraan yang memadai. Guru yang sejahtera memiliki lebih banyak waktu, energi, dan sumber daya untuk melakukan persiapan pembelajaran yang matang, termasuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pemilihan metode yang variatif, serta pengembangan media pembelajaran yang inovatif.

Nurafni dkk. (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja komite sekolah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Salah satu peran penting kepala sekolah dan komite dalam temuan tersebut adalah memastikan kesejahteraan guru terjaga

melalui pengelolaan anggaran sekolah yang berpihak pada peningkatan insentif dan fasilitas guru. Hal ini menegaskan bahwa mutu pembelajaran PAI tidak dapat dipisahkan dari dukungan manajerial terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Abdur Rohim dkk. (2025) menambahkan perspektif penting mengenai optimalisasi pengembangan karier guru sebagai faktor peningkatan mutu pembelajaran Islam di era Industri 4.0. Pengembangan karier yang berkelanjutan, yang merupakan bagian dari dimensi non-finansial kesejahteraan, memungkinkan guru PAI untuk terus memperbarui kompetensi digital dan pedagogisnya sehingga mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan generasi digital native tanpa kehilangan esensi nilai-nilai keislaman yang diajarkan.

Elys (2022) menguraikan bahwa peran kompetensi profesional guru PAI sangat menentukan efektivitas pembelajaran di kelas, mulai dari penguasaan materi, penerapan metode yang variatif, hingga kemampuan mengelola kelas secara efektif. Namun demikian, penguatan kompetensi profesional tersebut memerlukan dukungan sistemik berupa pelatihan berkelanjutan yang hanya dapat diakses secara optimal oleh guru yang memiliki kestabilan ekonomi dan waktu luang yang cukup, yang keduanya sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang diterima.

Studi terdahulu juga menunjukkan bahwa kesejahteraan guru berkontribusi terhadap penurunan tingkat kejenuhan kerja (burnout) yang kerap menjadi penyebab menurunnya kualitas interaksi guru dengan peserta didik. Pristiwanti dkk. (2022) dalam kajiannya mengenai hakikat pendidikan menegaskan bahwa proses pendidikan yang bermakna hanya dapat terwujud melalui interaksi edukatif yang sehat antara guru dan peserta didik, sebuah kondisi yang menuntut kestabilan emosi dan kesejahteraan psikologis guru sebagai prasyarat dasarnya. Guru PAI yang mengalami kejenuhan akibat tekanan ekonomi berkepanjangan cenderung menunjukkan penurunan kesabaran dalam membimbing peserta didik yang menghadapi kesulitan memahami materi keagamaan, sehingga esensi pembelajaran yang bermakna sulit tercapai.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa kesejahteraan guru PAI berperan sebagai faktor pendukung (enabling factor) bagi peningkatan mutu pembelajaran melalui setidaknya tiga jalur utama. Pertama, jalur motivasional, di mana kesejahteraan yang layak meningkatkan motivasi intrinsik guru untuk mengajar secara optimal. Kedua, jalur kapasitas profesional, di mana kesejahteraan memberikan ruang dan sumber daya bagi guru untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesionalnya. Ketiga, jalur psikologis-spiritual, di mana ketenangan batin akibat terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan memungkinkan guru PAI menjalankan fungsi keteladanan secara lebih otentik dan berpengaruh terhadap internalisasi nilai keagamaan peserta didik.

Tabel 1 Dimensi Kesejahteraan Guru Pendidikan Agama Islam dan Indikatornya

Dimensi	Indikator Utama	Kontribusi terhadap Mutu Pembelajaran
Finansial	Gaji pokok, tunjangan profesi, insentif kinerja	Meningkatkan fokus dan waktu persiapan pembelajaran
Non-finansial	Jaminan kesehatan, jaminan hari tua, pengembangan karier	Mendukung keberlanjutan pengembangan kompetensi profesional

Psikologis	Pengakuan, penghargaan, rasa aman kerja	Memperkuat motivasi intrinsik dan keteladanan guru

3.5. Tantangan dalam Pemenuhan Kesejahteraan Guru PAI

Meskipun urgensi peningkatan kesejahteraan guru PAI telah banyak diuraikan dalam berbagai kajian, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salamun dan Sauri (2023) mengidentifikasi bahwa evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia masih menghadapi problematika terkait konsistensi implementasi antara regulasi pusat dan praktik di daerah, termasuk dalam pemenuhan hak kesejahteraan guru PAI yang berstatus honorer maupun guru pada satuan pendidikan swasta.

Faktor budaya organisasi sekolah turut memengaruhi sejauh mana isu kesejahteraan guru PAI mendapat perhatian dalam pengambilan kebijakan internal satuan pendidikan. Pada sebagian sekolah, guru PAI kerap ditempatkan sebagai pelengkap kurikulum dibandingkan mata pelajaran yang diujikan secara nasional, sehingga alokasi anggaran pengembangan dan insentif cenderung lebih rendah dibandingkan guru mata pelajaran yang dianggap lebih prioritas dalam pengukuran capaian akademik formal. Pandangan ini perlu dikoreksi mengingat kontribusi PAI terhadap pembentukan karakter jangka panjang tidak kalah strategis dibandingkan capaian akademik kognitif semata.

Tantangan lain muncul dari aspek pembiayaan pendidikan yang terbatas, khususnya pada satuan pendidikan swasta dan madrasah yang bergantung pada sumber dana masyarakat. Keterbatasan anggaran ini seringkali berdampak langsung pada rendahnya honorarium guru PAI dibandingkan standar kelayakan hidup di daerah masing-masing. Selain itu, mekanisme sertifikasi dan tunjangan profesi guru yang mensyaratkan pemenuhan jam mengajar minimum turut menjadi kendala tersendiri bagi guru PAI di sekolah dengan jumlah rombongan belajar terbatas.

Ru'iya dkk. (2021) turut menegaskan bahwa tantangan kesejahteraan guru PAI semakin kompleks pada konteks pendidikan inklusi, di mana tuntutan kompetensi khusus tidak diimbangi dengan skema insentif maupun pengakuan profesional yang setara. Demikian pula, Setiawan (2024) mencatat bahwa transisi menuju Kurikulum Merdeka menuntut adaptasi cepat dari guru PAI tanpa disertai dukungan pelatihan dan kompensasi tambahan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kelelahan kerja (burnout) yang pada gilirannya menurunkan kualitas pembelajaran.

3.6. Upaya dan Strategi Peningkatan Kesejahteraan Guru PAI

Berbagai upaya strategis dapat ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan guru PAI sebagai landasan penguatan mutu pembelajaran. Turmidzi (2022) menekankan pentingnya implementasi perencanaan strategis dalam manajemen madrasah, termasuk perencanaan anggaran yang berpihak pada peningkatan insentif dan fasilitas kerja guru, sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah secara keseluruhan.

Ulfah dan Noviansah (2020) menawarkan pendekatan supervisi coaching sebagai strategi peningkatan kinerja mengajar guru yang tidak semata berorientasi pada evaluasi administratif, tetapi juga pada pemberdayaan dan pendampingan profesional yang berkelanjutan. Pendekatan ini dapat dipadukan dengan skema penghargaan non-finansial, seperti pengakuan atas prestasi mengajar dan kesempatan berbagi praktik baik

antar-guru PAI, sebagai komplemen dari peningkatan kesejahteraan finansial yang mungkin masih terbatas.

Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, Utamy, Ahmad, dan Eddy (2020) menegaskan pentingnya implementasi manajemen SDM yang terencana di lingkungan satuan pendidikan, termasuk perencanaan pengembangan karier, sistem penggajian yang transparan, serta mekanisme penilaian kinerja yang berkeadilan bagi seluruh guru, termasuk guru PAI berstatus honorer. Minsih, Rusnilawati, dan Mujahid (2019) menambahkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memainkan peran sentral dalam membangun budaya sekolah yang berkualitas, termasuk dalam memperjuangkan kesejahteraan guru melalui advokasi kepada pemangku kepentingan dan optimalisasi sumber pendanaan sekolah.

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi instrumen pendukung dalam meningkatkan efisiensi kerja guru PAI sekaligus membuka peluang tambahan penghasilan yang halal, misalnya melalui pengembangan konten pembelajaran daring, penulisan bahan ajar digital, atau keikutsertaan dalam program pelatihan bersertifikat yang memberikan insentif finansial. Abdur Rohim dkk. (2025) menegaskan bahwa penguasaan kompetensi digital oleh guru PAI di era Industri 4.0 tidak hanya meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga membuka ruang diversifikasi sumber penghasilan yang dapat melengkapi kesejahteraan finansial guru di luar skema honorarium formal dari satuan pendidikan.

Selain upaya pada tataran satuan pendidikan, penguatan kebijakan pada tataran nasional dan daerah juga menjadi keniscayaan. Hal ini mencakup perluasan skema pengangkatan guru PAI honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penyesuaian standar honorarium minimum bagi guru non-ASN, serta penguatan program pengembangan profesional berkelanjutan yang dapat diakses secara merata oleh guru PAI di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan guru PAI yang berkeadilan sebagai fondasi peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara berkelanjutan.

3.7. Perspektif Islam tentang Kesejahteraan dan Keadilan bagi Guru

Ajaran Islam secara eksplisit menempatkan penghormatan terhadap guru pada kedudukan yang sangat tinggi, sejajar dengan penghormatan kepada orang tua, sebagaimana tercermin dalam berbagai atsar dan tradisi keilmuan Islam klasik yang menempatkan guru sebagai pewaris para nabi (waratsat al-anbiya'). Kedudukan mulia ini semestinya berimplikasi pada kewajiban kolektif umat dan negara untuk memastikan hak-hak ekonomi dan sosial guru terpenuhi secara layak, bukan sekadar mengandalkan semangat pengabdian personal semata.

Prinsip pemberian upah yang layak dan tepat waktu (ujrah al-mitsl) merupakan salah satu ajaran fundamental dalam fikih muamalah Islam, yang menegaskan bahwa setiap pekerja, termasuk guru, berhak menerima imbalan yang sepadan dengan tenaga, waktu, dan keahlian yang telah dicurahkan. Rusli (2025) menegaskan bahwa penerapan prinsip ini secara konsisten terhadap guru honorer, termasuk guru PAI, merupakan wujud nyata dari keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar utama ajaran Islam, sekaligus menjadi teladan konkret bagi peserta didik mengenai bagaimana nilai keadilan seharusnya dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh, konsep maslahah (kemaslahatan) dalam kajian ushul fikih dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kebijakan kesejahteraan guru PAI. Kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan guru PAI secara layak akan

mendatangkan maslahah yang luas, baik bagi guru itu sendiri, peserta didik, maupun masyarakat secara keseluruhan, karena kualitas pendidikan karakter dan keagamaan generasi muda turut ditentukan oleh kondisi kesejahteraan para pendidiknya. Sebaliknya, pengabaian terhadap kesejahteraan guru PAI berpotensi menimbulkan mafsadah (kemudaratan) jangka panjang berupa menurunnya kualitas pendidikan agama dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

3.8. Implikasi Kesejahteraan Guru PAI terhadap Kualitas Peserta Didik

Kesejahteraan guru PAI pada akhirnya tidak hanya berdampak pada kondisi personal guru itu sendiri, tetapi juga memiliki efek berantai (ripple effect) terhadap kualitas belajar dan pembentukan karakter peserta didik. Guru yang bekerja dalam kondisi tertekan secara ekonomi cenderung lebih sulit menunjukkan kesabaran, empati, dan konsistensi dalam mendampingi peserta didik, terutama dalam menghadapi perilaku peserta didik yang membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus dalam aspek keagamaan dan moral.

Sebaliknya, guru PAI yang sejahtera secara ekonomi dan psikologis cenderung lebih mampu membangun relasi pedagogis yang hangat dan suportif dengan peserta didik, yang pada gilirannya memperkuat efektivitas internalisasi nilai-nilai keislaman. Elys (2022) menegaskan bahwa efektivitas pembelajaran PAI sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara guru dan peserta didik, di mana keteladanan dan kedekatan emosional menjadi kunci keberhasilan penanaman nilai, bukan semata metode pengajaran yang digunakan.

Dengan demikian, investasi terhadap kesejahteraan guru PAI pada hakikatnya merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan, mengingat pendidikan agama Islam memiliki peran sentral dalam membentuk fondasi moral dan spiritual generasi muda yang akan menjadi penentu arah peradaban bangsa di masa depan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran signifikan sebagai faktor pendukung dalam peningkatan mutu pembelajaran. Kesejahteraan guru PAI mencakup tiga dimensi utama, yaitu finansial, non-finansial, dan psikologis, yang secara bersama-sama membentuk kondisi kerja yang memungkinkan guru menjalankan fungsi pengajaran dan keteladanan secara optimal.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesejahteraan guru PAI, khususnya yang berstatus honorer, masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari kesenjangan honorarium, beban kerja yang tidak proporsional, hingga keterbatasan akses pengembangan profesional. Kondisi ini berdampak pada rendahnya motivasi kerja dan berpotensi menurunkan kualitas proses pembelajaran PAI di sekolah maupun madrasah.

Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan guru PAI melalui jalur motivasional, kapasitas profesional, dan psikologis-spiritual terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, kreativitas, dan komitmen guru dalam mengelola pembelajaran yang bermutu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan antara pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan guru PAI yang berkeadilan, antara lain melalui perluasan skema pengangkatan status kepegawaian, penyesuaian standar honorarium, penguatan manajemen sumber daya manusia di

satuan pendidikan, serta program pengembangan profesional berkelanjutan yang merata bagi seluruh guru PAI di Indonesia.

Penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif lapangan, disarankan untuk menguji secara langsung hubungan kausal antara kesejahteraan guru PAI dan capaian mutu pembelajaran pada konteks satuan pendidikan yang lebih spesifik, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih kontekstual dan aplikatif.

Pada akhirnya, mewujudkan kesejahteraan guru PAI yang berkeadilan bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan masyarakat luas. Komitmen kolektif ini penting ditumbuhkan mengingat kesejahteraan guru PAI pada hakikatnya merupakan investasi strategis jangka panjang bagi terwujudnya generasi bangsa yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi pemikiran dalam penyusunan artikel ini, termasuk institusi tempat penulis bernaung serta berbagai sumber literatur ilmiah yang telah dirujuk sebagai landasan analisis dalam kajian kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam ini.

Daftar Pustaka

Abdur Rohim., Sukarman., Maskur., & Muzayyin. (2025). Optimalisasi Pengembangan Karier Guru untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Islam di Era Industri 4.0. Soko Guru: Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 5(1)

Ainiyah, N. (2013). Pembentukan Karakter melalui Pendidikan Agama Islam. Jurnal Al-Ulum, Volume 13(1), pp. 25–38

Dudung, A. (2018). Kompetensi Profesional Guru. JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan), Volume 5(1), pp. 9–19

Elys, H. (2022). Peran Kompetensi Profesional Guru PAI dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 6(2), pp. 45–58

Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, Volume 50(4), pp. 370–396

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Sage Publications, California, USA

Minsih., Rusnilawati., & Mujahid, I. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membangun Sekolah Berkualitas di Sekolah Dasar. Profesi Pendidikan Dasar, Volume 1(1), pp. 29–40

Muspawi, M. (2021). Strategi Peningkatan Kinerja Guru. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 21(1), pp. 101–109

Nurafni, K., Saguni, F., & Hasnah, S. (2022). Pengaruh Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam. Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan, Volume 1(1), pp. 44–68

Pristiwanti, D., Badariah., Hidayat, S., & Dewi, R.S. (2022). Pengertian Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), Volume 4(6), pp. 7911–7915

Putra, I.W.A., & Negara, I.G.A.O. (2021). Kontribusi Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SD. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 5(1), pp. 95–104

Putri, A.D.K., & Imaniyati, N. (2017). Pengembangan Profesi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Volume 2(2), pp. 93–101

Rosni, R. (2021). Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jurnal Education: Jurnal Pendidikan Indonesia, Volume 7(2), pp. 113–124

Ru'iya, S., Akhmad, F., Putwiyani, D., & Sulistiawan, A. (2021). Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Inklusi di Yogyakarta. Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 10(1), pp. 70–90

Rusli, C. (2025). Kesejahteraan Guru Honorer dalam Pandangan Islam. Jurnal Pendidikan Dasar, Menengah dan Kejuruan, Volume 1(3), pp. 10–17

Safitri, D.N.L. (2023). Analisis Kesejahteraan Guru Honorer dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MI Manba'ul Islam Kota Bogor. Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam, Bogor

Salamun, A., & Sauri, S. (2023). Isu dan Masalah dalam Analisis Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 12(1), pp. 55–70

Setiawan, S.A. (2024). Tantangan Guru PAI Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 8(2), pp. 88–101

Turmidzi, I. (2022). Implementasi Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. Tarbawi: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Volume 5(2), pp. 112–125

Ulfah, M., & Noviansah, A. (2020). Supervisi Coaching: Peningkatan Kinerja Mengajar Guru. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 2(2), pp. 65–76

Utamy, R., Ahmad, S., & Eddy, S. (2020). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Journal of Education Research, Volume 1(3), pp. 225–236

Wahyudin, D. (2020). Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Guru dan Beban Kerja Guru terhadap Kinerja Guru. An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 5(2), pp. 135–148

Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu: Konsep Ujrah dan Maslahah dalam Muamalah. Gema Insani, Jakarta